

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Masuknya virus corona yaitu pada 2 Maret 2020, bermula dari Warga Negara Indonesia yang berkontak langsung dengan Warga Negara Jepang yang datang ke Indonesia. Sejumlah daerah menerapkan berbagai langkah dan kebijakan untuk menekan angka penyebaran dan penularan virus jenis baru Covid-19, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Imbauan untuk tak mudik juga terus disampaikan pemerintah. Mereka yang berpindah dari satu daerah ke daerah lain dikhawatirkan akan menjadi pembawa virus corona, dan berpotensi menyebabkan mata rantai penyebaran tidak berhenti. Adapun masyarakat yang dari awal kurang mampu dan masyarakat yang sebelumnya memiliki pekerjaan kantoran banyak yang di PHK akibat munculnya Covid-19, maka dari itu Dinas Sosial (Dinsos) memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak dari Covid-19. Dinas Sosial Yogyakarta telah melakukan Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat jogja yang terdampak Covid-19. Sebenarnya bantuan tersebut adalah program Nasional dari Kementerian Sosial yang mana hal tersebut untuk menunjang kebutuhan masyarakat. Bantuan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Yogyakarta banyak sekali ragamnya, salah satunya yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bantuan ini merupakan bantuan pangan dari pemerintah yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pangan setiap keluarga khususnya di Kabupaten Bantul, memberikan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak selama covid-19. Masyarakat kabupaten bantul yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM), BPNT yang awalnya Rp 110.000 naik menjadi Rp 150.000. Bantuan ini diberikan dalam bentuk non tunai dan dicairkan setiap bulannya yang nantinya

akan ditransfer ke rekening masing-masing, dan bisa ditukarkan beras dan telur di warung yang sudah menjadi mitra Himbara yang sudah tersebar di wilayah penerima manfaat (Dinas Sosial, 2019).

Pada implementasi kebijakan bantuan BPNT ini berjalan dengan aturan yang sudah ditetapkan. Bantuan ini sudah berjalan sejak tahun 2017, hal ini dikarenakan masyarakat yang ada di negara Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang kurang mampu/miskin, permasalahan kemiskinan ini telah menjadi permasalahan multidimensional, disini pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penanggulangan permasalahan kemiskinan yang mana dituntut untuk memiliki komitmen yang kuat dan perlu strategi multi disiplin. Bagaimanapun pemecahan masalah kemiskinan bukan hanya sekedar pemberi bantuan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat miskin. Sedangkan (Yunus, 2019) mengatakan bahwa BPNT adalah salah satu cara dalam menanggulangi kemiskinan yang mana program ini bergerak tentang kegiatan sosial berbasis keluarga untuk masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pokok pangan. Keunggulan Program BPNT yaitu:

1. Mudah dijangkau dan digunakan oleh keluarga penerima manfaat (KPM)
2. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM tentang kapan, berapa, jenis, kualitas, dan harga bahan pangan (beras atau telur), serta tempat membeli sesuai dengan preferensi
3. Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM.
4. Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada KPM.
5. Warung dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber sehingga terdapat ruang alternatif pasokan yang lebih optimal.

6. Bank Penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening KPM dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada KPM, tidak melakukan pemesanan bahan pangan.
7. Strategi pemerintah mengurangi deviasi KPM sebagai tindak lanjut saran KPK terkait ketepatan sasaran penerima manfaat bantuan sosial

Bupati Bantul, Suharsono mengatakan bahwa BPNT ini memang dikhususkan bagi masyarakat yang tidak bisa bekerja semenjak munculnya covid-19, data masyarakat yang mendapatkan bantuan masih sangat dinamis, dikarenakan hampir setiap hari mengalami perubahan pada pernyataanya di www.tegar.id. Seharusnya masyarakat harus lebih dipandang subyek daripada obyek, dan mereka harus diberikan kesempatan untuk merancang dan strategi dalam penanggulangan kemiskinan dan peran pemerintah disini sebagai fasilitator, sehingga benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dimasyarakat. Salah satu hal yang menarik dalam pengambilan objek penelitian di Kabupaten Bantul ini adalah karena data penerima bantuan pemerintah BPNT ini terbanyak adalah di Kabupaten Bantul. Hal inilah yang ingin saya teliti tentang alasan Kabupaten Bantul menjadi salah satu wilayah yang menerima bantuan paling banyak dibandingkan dengan wilayah lain.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1.2.1 Bagaimana implementasi program bantuan BPNT bagi masyarakat di Kabupaten

Bantul selama Covid-19?

1.2.2 Apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi program BPNT bagi masyarakat

di Kabupaten Bantul selama covid-19?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1.3.1 Untuk mengetahui sukses atau tidaknya implementasi program BPNT serta faktor-

faktor yang mempengaruhi implementasi program ini yang dilakukan oleh Dinas

Sosial kepada masyarakat Kabupaten Bantul selama Covid-19

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi kajian ilmiah yaitu pada kajian tentang penyaluran bantuan sosial selama masa pandemi Covid-19 yang direalisasikan oleh Dinas Sosial Yogyakarta. Serta dapat mengetahui secara langsung bagaimana implementasi program tersebut dilapangan dengan kekurangan dan kelebihan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat. Sehingga kiranya pemerintah bantul dapat mengetahuinya hal tersebut dari penelitian ini serta hal ini dapat menambah informasi untuk peneliti selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Teoritik

Teoritik Untuk seluruh tahapan penelitian maupun hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan sekaligus pengetahuan mengenai bantuan sosial dan dapat diterima untuk berkontribusi dalam membrikan wawasan serta membantu peneliti berikutnya untuk penelitian yang serupa.

1.5 PENELITIAN TERDAHULU

Berikut adalah beberapa ringkasan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dan mendukung dalam penelitian ini :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian, Peneliti dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Pengembangan Implementasi Aplikasi Bantuan Sosial Berbasis Mobile Pada Dinas Sosial (Silvi et al., 2019)	Jurnal ini menggunakan metode penelitian eksperimen, yaitu penelitian yang melibatkan penyelidikan perlakuan pada parameter atau variable tergantung penelitian dan menggunakan tes yang dikendalikan oleh si peneliti itu sendiri	Dengan adanya aplikasi bantuan sosial yang berbasis mobile hal ini akan sangat mempermudah Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan baik berbentuk uang maupun barang dan juga mempermudah dalam pengontrolan kepada lembaga-lembaga dalam melaksanakan kegiatan. Aplikasi tersebut juga dapat digunakan untuk berinteraksi antara pemerintah dan masyarakat dalam hal pelayanan maupun pengaduan. Kelebihan dari penelitian ini yaitu data yang disajikan dalam penelitian ini cukup lengkap serta diolah dengan sangat baik sehingga mudah dipahami untuk penelitian selanjutnya
2.	Implementasi Program Bantuan Sosial Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pembudidayaan Ikan Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Poso (Zy, 2017)	Jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Dalam penjelasan pada jurnal ini yaitu bantuan sosial di kabupaten poso berbentuk pembudidayaan ikan yang ditujukan untuk nelayan, karena mayoritas penduduk disana bekerja sebagai nelayan. Dengan diadakannya bantuan tersebut bertujuan agar adanya peningkatan kesejahteraan dimasyarakat kabupaten poso. Tetapi

			<p>kurangnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat membuat bantuan sosial tersebut tidak berjalan efektif dan adanya ketidakadilan dari pelaksana, dikarenakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat buakn berdasarkan persyarakatan tetapi adanya indicator struktur birokrasi. Kekurangan dalam penelitian ini yaitu tidak adanya kesimpulan yang dicantumkan oleh penulis di dalam jurnal yang mengakibatkan kurang dipahaminya penelitian ini dalam keseluruhan.</p>
3.	<p>Distribusi Beras Bulog Pasca Bansos Rastra Dan Bantuan Pangan Non Tunai (Hidayat, 2019)</p>	<p>Jurnal ini menggunakan analisis data gabungan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif</p>	<p>Beralihnya program bansos Ranstra menjadi BPNT mengakibatkan aktivitas oprasional BULOG menjadi menurun, dikarenakan selama ini kegiatan yang dilakukan oleh BULOG didominasi dengan kegiatan publik/pemerintah. Disarankan BULOG harus melakukan mengambangan dan pengoptimalan kegiatan bisnis secara komersil, mengingat BULOG memiliki organisasi, infrastruktur, dan sumber daya yang sangat besar. Kelebihan dari jurnal ini yaitu data maupun variable yang dilampirkan cukup baik sehingga dapay dipahami.</p>
4.	<p>Analisis Dan Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Pangan Non Tunai</p>	<p>Jurnal ini menggunakan metode penelitian <i>Simple Additive Weighting</i> (SAW)</p>	<p>Dalam jurnal ini BPNT dalam proses pemberian kepada penduduk miskin sudah tepat karna dengan system yang dirancang dapat mempermudah pelaksanaan</p>

	(BPNT) Dengan <i>Simple Additive Weighting</i> (SAW) Pada Dinas Sosial Kota Jambi (Riyansuni & Devitra, 2020)		dengan menggunakan SAW. Kelebihan dari jurnal ini sangat mempermudah penelitian selanjutnya untuk meneliti kasus yang sama
5.	Pengembangan <i>E-Government</i> Inovasi Pelayanan Publik Kegiatan Hibah dan Bantuan Sosial di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor (Dewanto et al., 2019)	Jurnal ini menggunakan metode perangkat lunak yaitu <i>Rapid Application Development</i> (RAD). Penulis menganggap metode ini sangat efektif dan efisien untuk penelitian ini.	Temuan dari jurnal ini yaitu upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan masyarakat didalam penyelenggaraan bantuan sosial atau hibah, suatu inovasi pelayanan berbasis elektronik atau e-government, hal ini sangat efektif dikarenakan dalam pelayanan bantuan sosial ada beberapa permasalahan salah satunya yaitu tentang transparansi dana. Kekurangan dari jurnal ini yaitu kalimat yang digunakan sulit dipahami untuk penelitian selanjutnya.
6.	Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu (Unisma et al., 2020)	Jurnal ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Pengimplementasian program BPNT di kelurahan sisir tidak ditemukannya kendala dan juga sedah tepat sasaran dilihat dari variable lingkungan kondisi sosial ekonomi masyarakat sisir yang sudah mendukung dengan adanya pelaksanaan progam BPNT, tetapi program ini harus terus dipantau agar program dapat berjalan dengan baik serta edukasi sosialisasi terhadap masyarakat yang belum paham, kelebihan dari jurnal ini yaitu kalimat yang disampaikan sangat baik sehingga mudah dipahami untuk peneliti selanjutnya.

7.	Implementasi Program Bantuan Sosial Dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia Terlantar (Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu)(Qomariah Mariam, 2020)	Jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Hasil penelitian dari jurnal ini pengimplementasian bantuan sosial di kota batu sudah cukup baik serta perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial sudah membantu memperbaiki kondisi kesejahteraan lansia yang terlantar, walaupun secara keseluruhannya belum tercover hal ini disebabkan keterbatasannya anggaran maupun fasilitas seperti rumah singgah sementara. Dalam jurnal ini data serta kalimat yang digunakan sudah cukup baik sehingga dapat dilanjutkan untuk penelitian yang serupa.
8.	Peran Dinas Sosial Kota Manado Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas (Theresia, 2019)	Jurnal ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Temuan dari jurnal ini yaitu pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas dikota manado belum maksimal dan belum merata kepada penyandang disabilitas, kurangnya edukasi maupun pelatihan. Data yang digunakan oleh dinas sosial yaitu data lama seharusnya dinas sosial manado melakukan evaluasi kembali untuk menginput data-data penyandang disabilitas serta harus turun kelapangan dan melakukan pendataan ulang, agar setiap kegiatan maupun bantuan dapat tersalurkan secara menyeluruh untuk penyandang disabilitas.
9.	Dampak Program Bantuan Sosial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan	Jurnal ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif dan kuantitatif-data	Bantuan sosial yang dilakukan yaitu berupa pembangunan infrastruktur dikarenakan daerah-daerah yang tertinggal dalam sektor ekonominya

	Kemiskinan Kabupaten Tertinggal Di Indonesia (Putra et al., 2015)	panel	<p>masih kurang, maka dari itu dengan pembangunan infrastruktur kedepanya wilayah-wilayah tersebut akan maju dalam sektor perekonomian dll. Masyarakat pun bisa membuka usaha mikro kecil dan pelaku usaha yang sudah ada, dengan adanya infrastruktur biaya yang digunakan untuk transport lebih kecil.</p> <p>Seharusnya pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas SDM di daerah tertinggal dengan membangun sekolah di daerah tertinggal dengan begitu tidak hanya pembangunan saja yang maju tetapi kualitas masyarakatnya pun juga maju.</p>
10	Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Di Provinsi Lampung (Hikmah Wati, 2016)	Jurnal ini menggunakan metode penelitian hokum normative-empiris	<p>Bantuan sosial yang dilakukan oleh dinas sosial untuk penanggulangan kemiskinan di perkotaan provins lampung ada beberapa kendala saat melakukan sosialisasi kepada KUBE (kelompok usaha bersama) karena masing-masing dari mereka masih menggunakan bahasa daerah atau bahasa suku masing-masing dan bantuan yang dialokasikan kepada KUBE yang bertujuan untuk kesejahteraan sering disalah gunakan. Kekurangan dari jurnal ini yaitu referensi yang digunakan sangat sedikit sehingga peneliti ini tidak dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.</p>

Dalam penelitian terdahulu terdapat beberapa persamaan maupun perbedaan dengan penelitian yang akan diambil sekarang. Persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang bantuan sosial tetapi target yang menjadi sasaran bansos berbeda-beda, ada yang berfokus memberi bantuan kepada lansia dan bansos modal usaha. Dari penelitian sebelumnya ada beberapa permasalahan seperti masyarakat yang tidak mendapatkan bansos dikarenakan dinas sosial masih memakai data lama, dikarenakan dinas sosial enggan turun kelapangan untuk pembaharuan data. Perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu yaitu beberapa dari penelitian terdahulu ada yang menggunakan metode penelitian kuantitatif.

1.6 KERANGKA TEORI

1.6.1 Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan publik menurut Thomas R. Dye dalam (Winarno Budi, 2005) dalam bukunya “understanding public policy” mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah ”a whatever goverment choose to do or no to do” artinya apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Kebijakan publik dalam hal ini bukan semata-mata merupakan pernyataan atau keinginan pemerintah ataupun pejabat pemerintah saja tetapi harus mengandung manfaat besar bagi warganya dan sebaiknya kebijakan tersebut tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, sehingga disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Parsons dalam (Tahir Arifin, 2014) memberikan gagasan tentang kebijakan adalah seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan publik. Menurutnya kata policy mengandung makna kebijakan sebagai rationale, sebuah manifestasi dari penelitian pertimbangan. Artinya sebuah kebijakan adalah usaha untuk

mendefinisikan dan menyusun basis rasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.

Kemudian (Islamy M.Irfan, 2000) mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian kebijaksanaan negara tersebut diatas mempunyai implikasi sebagai berikut:

1. Bahwa kebijakan negara itu dalam bentuk Peraturan Daerah nyata berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
2. Bahwa kebijakan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk nyata.
3. Bahwa kebijaksanaan negara baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
4. Bahwa kebijaksanaan itu harus senantiasa ditujukan untuk kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Jadi aktivitas suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh proses kebijakan yang terdiri dari formulasi, implementasi dan evaluasi. Ketiga aktivitas pokok proses kebijakan tersebut mempunyai hubungan kausalitas serta berpola siklikal atau bersiklus secara terus menerus sampai suatu masalah publik atau tujuan tertentu tercapai.

1.6.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan, namun pada prinsipnya setiap kebijakan public selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan. (Edward III George C, 1984) Bahwa tanpa implementasi yang efektif

keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat. Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut (Winarno Budi, 2005), Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat berkaitan erat dengan beberapa aspek diantaranya pertimbangan para pembuat kebijakan, komitmen dengan konsistensi tinggi para pelaksana kebijakan, dan perilaku sasaran. Implementasi sebuah kebijakan secara konseptual bisa dikatakan sebagai sebuah proses pengumpulan sumber daya alam, manusia maupun biaya dan diikuti dengan penentuan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan. Dari beberapa definisi implementasi di atas, maka penulis mengartikan implementasi kebijakan sebagai suatu proses pelaksanaan dari kebijakan yang telah dirumuskan, direncanakan, dibuat dan disahkan oleh pemerintah dalam rangka untuk memperoleh hasil yang diharapkan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Van Meter dan Van Horn dalam (Winarno Budi, 2008) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku (Abdul Wahab Solichin, 2008), mengatakan bahwa:

Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

1. Teori George C. Edward

Menurut pandangan Edward III dalam (Subarsono, 2011) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu:

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure (SOP)* dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

2. Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dalam (Subarsono, 2011) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation).

Variabel tersebut mencakup:

- a. Sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan
- b. Jenis manfaat yang diterima oleh target group
- c. Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan
- d. Apakah letak sebuah program sudah tepat
- e. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci
- f. Apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

3. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam (Subarsono, 2011) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (tractability of the problems), karakteristik

kebijakan/undang-undang (ability of statute to structure implementation) dan variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation).

4. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Meter dan Horn dalam (Subarsono, 2011) ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Menurut pandangan Edward III (Winarno Budi, 2008) proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting, yaitu:

1. Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.
2. Faktor kedua adalah kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-intruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan.
3. Faktor ketiga adalah konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan jelas, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah

tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

Menurut pandangan Edwards dalam (Winarno Budi, 2008) sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Struktur Birokrasi menurut Edwards dalam (Winarno Budi, 2008) terdapat dua karakteristik utama, yakni Standard Operating Procedures (SOP) dan Fragmentasi:

SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.

1.6.3 Model Implementasi Kebijakan

Model adalah sebuah kerangka sederhana yang merupakan sebuah usaha untuk memudahkan penjelasan terhadap suatu fenomena (Indiahono Dwiyanto, 2009).

Pada prinsipnya terdapat dua pemilihan jenis model implementasi kebijakan public yaitu implementasi kebijakan publik yang berpola dari atas kebawah (*top-down*) dan dari bawah ke atas (*buttom-up*), serta pemilihan implementasi kebijakan publik yang

berpola paksa (*command and control*) dan pola pasar (*economic incentive*) (Nugroho Ryan, 2003). Maka untuk melihat bagaimana proses implementasi kebijakan publik yang berpola dari atas kebawah (*top-down*) dapat berlangsung secara efektif, dapat diketahui dari berbagai model implementasi diantaranya model Van Meter dan Van Horn dalam (Winarno Budi, 2002) beranjak dari suatu argument bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya Van Meter dan Van Horn menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi, dan suatu model konseptual yang menghubungkan kebijakan dengan kinerja kebijakan. Mereka menegaskan bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur implementasi.

Dengan memanfaatkan konsep-konsep tersebut maka permasalahan yang perlu dikaji dalam hubungan ini adalah:

1. Hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam mengenalkan perubahan dalam organisasi.
2. Seberapa jauhkah tingkat efektivitas mekanisme-mekanisme kontrol pada setiap jenjang struktur, masalah ini menyangkut kekuasaan dari pihak yang paling rendah dalam organisasi yang bersangkutan.
3. Seberapa pentingkah rasa keterkaitan masing-masing orang dalam organisasi (masalah kepatuhan).

Dari pandangan tersebut maka Van Meter dan Van Horn membuat tipologi kebijakan menurut:

1. Jumlah masing-masing perubahan yang akan terjadi. B) Jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi
2. Alasan dikemukakannya hal ini bahwa proses implementasi itu akan dipengaruhi oleh dimensi-dimensi kebijakan semacam itu, dalam artian bahwa implementasi akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit sementara kesepakatan terhadap tujuan terutama dari para implementor dilapangan relatif tinggi.

Hal ini yang dikemukakan mereka bahwa yang menghubungkan kebijakan dan kinerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas yang saling berkaitan. Variabel tersebut dijelaskan sebagai berikut dalam (Winarno Budi, 2002):

1. Sasaran Kebijakan (ukuran dasar dan tujuan kebijakan)
2. Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap sistem-sistem yang menentukan pencapaian kebijakan. Pencapaian ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara musyawarah.
3. Sumber Daya (sumber-sumber kebijakan)
4. Sumber-sumber layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif, serta siapa yang melaksanakan program.

5. Komunikasi (komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan)
6. Komunikasi antar organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Dalam menruskan pesan-pesan kedalam suatu organisasi ke organisasi lainnya, para komunikator dapat menyimpannya atau menyebarluaskan informasi, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Lebih dari itu, jika sumber-sumber informasi yang berbeda memberikan interpretasi-interpretasi yang tidak konsisten terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan, serta jika sumber-sumber yang sama memberikan interpretasi-interpretasi yang bertentangan, para pelaksana akan menghadapi kesulitan yang lebih besar untuk melaksanakan maksud-maksud kebijakan.
7. Karakteristik Agen Pelaksana (badan-badan pelaksana)
8. Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan informal yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi. Hal ini sangat penting karena kinerja kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri kebijakan yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen pelaksana yang terlibat didalamnya.
9. Kondisi Sosial dan Ekonomi
10. Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi, lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-

kelompok kepentingan dapat memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan yakni menolak atau mendukung, melihat bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

11. Disposisi (sikap para pelaksana)

12. Pada tahap ini pengalaman-pengalaman subjektivitas individu-individu memegang peranan penting. Van Metet dan Van Horn mengidentifikasi tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan yakni: a. respon implementor terhadap kebijakan yang akan dipengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan kebijakan, b. kognisi (pemahaman) para agen pelaksana terhadap kebijakan, c. intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

1.6.4 Program Bantuan Sosial

Bantuan sosial yaitu suatu pemberian berupa uang maupun barang yang nantinya diberikan kepada individu, keluarga, maupun kelompok yang mana bantuan tersebut ialah dari pemerintah. Bantuan ini tidak bersifat terus-menerus dan penerima manfaat secara efisien dan efektif mampu mengoptimalkan bantuan sehingga secara tidak langsung kehidupan masyarakat bisa berjalan dengan lancar setiap harinya. Ketentuan umum pemberian bantuan sosial menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, Pemda dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Anggota/kelompok masyarakat yang dimaksud meliputi:

1. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
2. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:

1. Selektif
2. Memenuhi persyaratan penerima bantuan;Kriteria persyaratan penerima bantuan meliputi:
 - a. Memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. Berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
 - c. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. Sesuai tujuan penggunaan.

Dalam jurnal (Nabavi, 2019) mengatakan bahwa Arti sosial dalam pembahasan ini ada 2 macam, yaitu : sosial secara umum dan sosial organisasi. Sosial secara umum dapat diartikan suatu kegiatan yang memiliki nilai-nilai banyak kemurniannya. Sebagai contoh : Suatu organisasi sosial atau non- organisasi (sosial pribadi) bekerja lebih menekankan pada kegiatan sosial tanpa pamrih yang benar-benar tulus keluar dari hati nurani yang paling dalam. Kegiatan tersebut dapat berupa penanggulangan bencana alam, kecelakaan sesaat, anak terlantar atau anak jalanan dan fakir miskin. Mereka

memberikan bantuan tersebut tidak ada tendensi apapun untuk menjadikan agar nama mereka terkenal. Sosial organisasi disini diartikan melakukan suatu kegiatan sosial dengan menampung bantuan yang diorganisir oleh pihak tertentu dan terkadang dipolitisir untuk mencari sensasi misalnya menjadikan orang tersebut terkenal atau dijadikan idola dan cenderung bermuatan politik. Sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini mekanisme tersebut dapat dikembangkan dengan menggunakan teknologi sehingga upaya pemberian bantuan tidak terjadi overloopping atau ada data-data yang tidak terdeteksi. Dalam penyampaian bantuan tersebut kita harus mendata semua masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dengan demikian data yang diperoleh merupakan data yang akurat sehingga dapat dijadikan untuk membuat database. Dengan database tersebut kita dapat membuat semacam kartu pintar (smart card) yang memiliki fasilitas untuk memperoleh bantuan secara benar dan tidak dapat disalahgunakan bagi orang yang tidak berhak menggunakannya.

Sistem kartu tersebut menggunakan sistem autentikasi yang tidak dapat digunakan oleh orang lain. Sehingga bantuan akan bisa diprogram dari pusat data sesuai dengan dana yang dimiliki badan sosial tersebut dan kebutuhan masyarakat yang akan dibantu. Sebagai contoh jika data yang terhimpun cukup besar maka sistem dapat diprogram sesuai dengan persediaan, sedangkan apabila dana terbatas sistem dapat diprogram seminimal mungkin sehingga dapat diperlakukan dengan adil dan merata. Dari sisi si pemberi dana, agar orang yang mampu bersedia memberikan bantuan kepada badan sosial tersebut, pemerintah turut berperan dalam hal ini misalnya bagi pengusaha yang menyisihkan pendapatannya kepada badan sosial maka dia akan diberi potongan pembayaran pajak berapa % dari pendapatannya dan mendapatkan kemudahan birokrasi

dalam mengurus sesuatu. Agar itu dapat berjalan kita perlu juga mendata pengusaha-pengusaha yang ada atau orang yang dianggap mampu untuk memberikan bantuan, kemudian dibuatkan databasenya dan diberikan kartu sebagai donator dari badan sosial tersebut.

1.6.5 Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan bank penyalur. Penyaluran program bantuan pangan secara non tunai mulai dilaksanakan pada tahun 2017 di 44 Kota yang memiliki akses dan fasilitas memadai. Secara bertahap, bantuan pangan akan diperluas ke seluruh Kota dan Kabupaten sesuai dengan kesiapan sarana dan prasarana penyaluran non tunai. Mulai tahun 2018, subsidi Raskin juga dialihkan menjadi bantuan sosial. Dengan demikian, mulai tahun 2018 Bantuan Pangan akan disalurkan ke masing-masing Kabupaten/Kota dalam bentuk non tunai atau natura, yaitu tetap dalam bentuk beras. Sebagian Kabupaten yang sarana dan prasarana penyaluran non tunainya belum memadai, tetap menyalurkan Raskin namun tanpa harga tebus yang harus dibayarkan Keluarga Penerima manfaat (KPM). Keberhasilan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Dalam jurnal (Tangdililing et al., 2014) mengatakan bahwa untuk mencapai keberhasilan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maka mekanisme pelaksanaannya harus diatur

dengan baik. 2. Tujuan, Manfaat dan Besaran Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

1. Tujuan.

Tujuan program BPNT adalah sebagai berikut:

- a. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
- b. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM.
- c. Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi KPM.
- d. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- e. Mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
- f. Mendorong usaha eceran rakyat.

2. Manfaat.

Manfaat program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- b. Meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial.
- c. Meningkatkan transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

- e. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

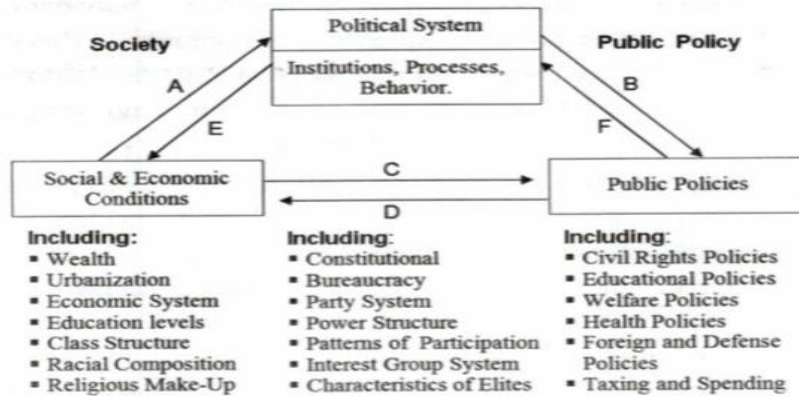
3. Besaran Manfaat

Besaran BPNT adalah Rp. 110.000/KPM/bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai, dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan telur sesuai kebutuhan. Apabila bantuan tidak dibelanjakan di bulan tersebut, maka nilai bantuan tetap tersimpan dan terakumulasi dalam Akun Elektronik Bantuan Pangan. Pemilihan komoditas beras dan telur dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berdasarkan tujuan peningkatan nutrisi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penambahan jenis komoditas untuk mencapai tujuan tersebut akan dievaluasi.

1.7 DEFINISI KONSEPTUAL

1.7.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik dalam hal ini bukan semata-mata merupakan pernyataan atau keinginan pemerintah ataupun pejabat pemerintah saja tetapi harus mengandung manfaat besar bagi warganya dan sebaiknya kebijakan tersebut tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, sehingga disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.



Sumber : Awan Y. Abdoellah, *Teori & Analisis Kebijakan Publik*, 2016:4

Gambar 1.1 Public Policy dilihat sebagai Variabel Bebas dan Variabel Tergantung (Terikat)

Keterangan gambar :

A = Dampak kekuatan-kekuatan dan kondisi lingkungan masyarakat terhadap lembaga-lembaga politik dan pemerintahan, proses politik dan perilaku politik.

B = Dampak lembaga-lembaga politik dan lembaga pemerintahan, proses-proses politik dan perilaku politik terhadap kebijakan pemerintah.

C = Dampak kekuatan-kekuatan dan kebijakan-kebijakan dan kondisi-kondisi lingkungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

D = Dampak (umpan balik) kebijakan pemerintah terhadap kondisi sosial-ekonomi.

E = Dampak (umpan balik) lembaga-lembaga politik, lembaga-lembaga pemerintahan, proses-proses politik dan perilaku politik terhadap kekuatan-kekuatan-kekuatan/kondisi sosial/ekonomi.

F = Dampak (umpan balik) kebijakan pemerintah terhadap lembaga-lembaga politik, lembaga-lembaga pemerintah, proses-proses politik dan perilaku politik.

1.7.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Dari beberapa definisi implementasi di atas, maka penulis mengartikan implementasi kebijakan sebagai suatu proses pelaksanaan dari kebijakan yang telah dirumuskan, direncanakan, dibuat dan disahkan oleh pemerintah dalam rangka untuk memperoleh hasil yang diharapkan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan salah satunya yaitu teori George C. Edward Menurut pandangan Edward III dalam (Subarsono, 2011) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh Komunikasi, Sumberdaya, Struktur Birokrasi, keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi ada beberapa variabel. Struktur Birokrasi menurut Edwards dalam (Winarno Budi, 2008) terdapat dua karakteristik utama, yakni Standard Operating Procedures (SOP) dan Fragmentasi: SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal

terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas.

1.7.3 Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan pangan non tunai menurut Kemensos (2017) adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau yang bekerjasama dengan bank penyalur. Program bantuan pangan non tunai (Junaidi, 2017) merupakan program yang diberikan pemerintah dengan cara memberikan subsidi non tunai melalui sebuah kartu elektronik yang dapat digunakan untuk transaksi pembelian sembako. Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilaksanakan secara bertahap, dimulai pada bulan Januari 2017 di beberapa daerah terpilih berdasarkan antara lain pada kesiapan infrastruktur pembayaran dan jaringan telekomunikasi, kesiapan pasokan bahan pangan dan usaha eceran, serta dukungan pemerintah daerah. Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilaksanakan melalui jaringan sistem pembayaran elektronik interoperabilitas dan interkoneksi yang dapat melibatkan Bank penyalur, prinsipal, dan perusahaan Switching. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat menukarkan BPNT mereka dengan bahan pangan. Kita (RPK), agen laku pandai, Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan atau usaha eceran lainnya. Pemilihan komoditas beras dan/atau telur dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berdasarkan tujuan untuk menjaga kecukupan gizi Keluarga Penerima Manfaat

(KPM). Penambahan jenis komoditas untuk mencapai tujuan tersebut dapat ditentukan berdasarkan hasil evaluasi. Keberhasilan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.

1.8 DEFINISI OPERASIONAL

Dengan melihat pengertian definisi konseptual diatas, dapat disimpulkan dalam menentukan keijakan publik, implementasi kebijakan dan BPNT yang mana hal tersebut dijabarkan melalui definisi operasional variabel sebagai berikut, yaitu :

Tabel 1.2 Definisi Operasional Variabel

Sub Variabel	Indikator
Standar dan Sasaran Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kebijakan BPNT telah sesuai dengan PERMENSOS No 20 Tahun 2019 2. Sasaran Kebijakan sesuai dengan pasal 4 PERMENSOS Tahun 2019 tentang kriteria penerima BPNT
Sumberdaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Daya yang terlibat dalam penyaluran BPNT adalah Bank Penyalur yang bersedia melakukan koordinasi bersama lembaga kementerian dalam penyaluran BPNT
Hubungan Antar Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Administrasi Kependudukan dengan lembaga yang bersangkutan
Karakteristik Agen Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salah satu kriteria agen pelaksana adalah yang memiliki e-warong
Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas sosial melakukan sosialisasi bersama masyarakat yang berhak menerima bantuan
Disposisi Implementor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengawasan terhadap agen pelaksana

Ketiga variabel ini merupakan variabel bebas yang dibedakan dengan variabel terikat yakni implementasi yang harus dilalui. Alasan lain yang mendasari perlunya implementasi kebijakan dapat dipahami dari pernyataan (Quade E.S, 1984) yang mengharapkan agar dapat ditunjukkan konfigurasi dan sinergi dari tiga variabel yang

menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yakni hubungan segi tiga variabel kebijakan, organisasi, dan lingkungan kebijakan.

1.9 METODE PENELITIAN

1.9.1 Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif menurut (Meleong J lexy, 2005) adalah penelitian untuk melihat suatu perilaku dan kebiasaan dari subyek tertentu kemudian didiskripsikan menggunakan bahasa dan kata medote bahasa ilmiah. Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang mana peneliti berusaha menganalisis menggunakan data-data yang ada. Jenis penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi dari Dinas Sosial. Diharapkan dengan pendekatan deskriptif ini mampu mengetahui bantuan sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini tempat laksanakan yaitu di Dinas Sosial DIY. Penelitian dilakukan untuk mendapatkan hasil dari mewawancarai responden yang di berikan pertanyaan untuk mendapatkan informasi terkait pemberian bantuan sosial dari dinas sosial kepada masyarakat setempat.

1.9.3 Unit Analisis Data

Unit analisis data adalah bagian yang merupakan diobservasikan, ditulis dan sebagai data, memisahkan menurut batasnya dan mengidentifikasi untuk analisis, unit analisis data adalah bagian dari isi yang diperuntukkan dapat diteliti untuk lebih lanjut lalu akan disederhanakan. Maka unit analisis data di dalam penelitian ini adalah dinas sosial dalam penyaluran BPNT.

1.9.4 Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, sumber data ini ditentukan secara sengaja agar mendapatkan informasi yang berhubungan dengan peneliti

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung didapatkan dari tangan pertama yang berkaitan dengan tujuan spesifik studi. Sumber data primer didapatkan melalui wawancara secara individu kepada narasumber agar bisa mendapatkan data secukupnya yang sesuai dengan pembahasan peneliti.

Teknik data yang akan digunakan yaitu wawancara. Wawancara dengan responden merupakan salah satu cara dalam mengumpulkan data dengan menanyakan kepada informan atau pihak yang berkompeten dalam suatu permasalahan.

2. Data Sekunder

(Uma sekaran, 2011) mengatakan bahwa data sekunder adalah data yang sudah ada, yaitu sumber data yang diperoleh dari industry media, web, dan seterusnya.

Data sekunder digunakan dari data primer sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti. Dari penelitian ini data yang akan dicari yaitu tentang implementasi kebijakan public, program bantuan sosial, dan kebijakan publik.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan pada saat penelitian dan penelitian harus melakukan pengumpulan data untuk mendapatkan data dalam sebuah penelitian. Pada penelitian kali ini penelitian menggunakan metode kualitatif yang harus mendapatkan data yang spesifik. Cara mengumpulkan data

bisa di dapatkan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi untuk cara pengumpulan data.

1. Wawancara

Dalam mengumpulkan data kualitatif wawancara sangat dibutuhkan untuk mendapatkan hasil dari pada penelitian. Wawancara adalah suatu obrolan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu peneliti dan responden, peneliti wajib mengajukan pertanyaan kepada responden dan responden wajib menjawab dari pertanyaan yang diajukan oleh sang peneliti. Dengan menggunakan teknik wawancara maka sang peneliti akan mendapatkan hasil wawancara yang baik dan juga dapat menggali informasi lebih dalam dari responden.

2. Dokumentasi

Dalam menggunakan data kualitatif dokumentasi sangat dibutuhkan untuk mendapatkan hasil dari data penelitian. Metode dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang terdiri dari gambar cenderamata, dan surat-surat. Dengan demikian dokumentasi tersebut dapat menjadi salah satu untuk mengabadikan moment pada saat penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan adalah berbentuk foto, dari data ini hal yang paling mendasar adalah yang tidak terbatas pada waktu serta ruang hal tersebut dapat memberi peluang kepada peneliti yang nantinya akan dapat mengetahui sesuatu yang telah terjadi di era selanjutnya.

1.9.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif data yang di kumpulkan atau terkumpul dengan melalui teknik pengumpulan data interview. Menurut (Miles M.B, 2014) dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan sangat banyak dan data yang di input juga dengan cara yang berbeda-beda seperti interview, obserbasi, catatan-catatan, dan kata-kata yang lebih banyak dari pada angka.

Menurut (Ivanovich Agusta, 2014) Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif, meliputi :

1. Pengumpulan Data yaitu kegiatan mengumpulkan data yang dibutuhkan selama penelitian.
2. Reduksi Data yaitu pengumpulan kasar data-data yang ada dilapangan, reduksi data dapat dilakukan dengan cara membuat ringkasan.
3. Penyajian Data yaitu penyajian yang telah menggambarkan keadaan secara singkat dengan data yang telah diringkas dan disajikan didalam laporan yang telah disusun secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami.
4. Menarik kesimpulan penelitian data yang telah diperoleh dan yang telah direduksi untuk kemudian dibuat dalam bentuk laporan dengan cara membandingkan, menghubungkan, dan juga memilih data yang mengarah pada permasalahan sehingga mampu menjawab permasalahan yang ada dan menghasilkan kesimpulan yang valid.